



**BUPATI SUKABUMI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMEKARAN DESA WANGUNJAYA  
MENJADI DESA WANGUNJAYA DAN DESA AMBARJAYA  
KECAMATAN CIAMBAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang :
- a. bahwa usul Pemekaran Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Wangunjaya menjadi Desa Wangunjaya dan Desa Ambar Jaya Kecamatan Ciambar, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Wangunjaya Menjadi Desa Wangunjaya dan Desa Ambarjaya Kecamatan Ciambar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**dan**

**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA WANGUNJAYA MENJADI DESA WANGUNJAYA DAN DESA AMBARJAYA KECAMATAN CIAMBAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat pemekaran, penghapusan atau penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMEKARAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Sungai Cisarua Kadusunan Babakan Sawah.

#### **Pasal 4**

Sebelum dimekarkan Desa Wangunjaya memiliki luas Wilayah 2.018 Ha, jumlah penduduk 9.318 Jiwa, 2.217 Kepala Keluarga, 4 Kedusunan, 12 Rukun Warga dan 43 Rukun Tetangga.

#### **Pasal 5**

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Wangunjaya (Desa induk); dan
- b. Desa Ambarjaya (Desa Pemekaran).

### **Pasal 6**

Posisi Desa Wangunjaya di bagian Utara sedangkan Desa Ambarjaya Kecamatan Ciambar di bagian Selatan .

### **Pasal 7**

Desa Wangunjaya memiliki luas Wilayah 1.075 Ha, jumlah penduduk 4.432 Jiwa, 1.048 Kepala Keluarga, 2 Kedusunan, 20 Rukun Tetangga, 6 Rukun Warga, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nangerang Kecamatan Cicurug yang dibatasi oleh Sungai Cisarua dan Taman Nasional Gede Pangrango;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Gede Pangrango;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ambarjaya Kecamatan Ciambar yang dibatasi oleh Sungai Cisarua;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwasari Kecamatan Cicurug yang dibatasi oleh Sungai Cileuleuy.

### **Pasal 8**

Desa Ambarjaya memiliki luas Wilayah 943 Ha, jumlah penduduk 4.886 Jiwa, 1.169 Kepala Keluarga, 2 Kedusunan, 6 Rukun Warga dan 23 Rukun Tetangga, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar yang dibatasi oleh Sungai Cisarua;
- b. sebelah Timur berbatasan Taman Nasional Gede Pangrango;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ciambar Kecamatan Ciambar yang dibatasi oleh Sungai Cipamutih;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ciambar Kecamatan Ciambar dan Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug yang dibatasi oleh batas buatan berupa patok Jalan setapak dan Sungai Cileuleuy.

### **Pasal 9**

Peta Wilayah Desa Wangunjaya dan Desa Ambarjaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Wilayah Desa Wangunjaya terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
  - a. Dusun Tangkil; dan
  - b. Dusun Sirnagalih.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Wangunjaya berada di Dusun Tangkil.